



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

Nomor : 0377 /M.PPN/11/2016
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Daftar Prioritas Proyek SBSN (DPP-SBSN) TA. 2017

Jakarta, 4 November 2016

Yth. Menteri Keuangan
di Jakarta

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Proyek melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pasal 13 PP No. 56 Tahun 2011 mengamanatkan Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk menyusun Daftar Prioritas Proyek yang akan dibiayai melalui SBSN. Daftar Prioritas Proyek disusun berdasarkan usulan proyek yang disampaikan oleh Pemrakarsa Proyek (Kementerian/Lembaga) dan dilakukan penilaian dengan mempertimbangkan kesiapan, kelayakan, serta kesesuaian proyek dengan RPJMN, Batas Maksimum Penerbitan SBSN (BMP-SBSN) dan kesesuaian proyek dengan prinsip syariah.
2. Batas Maksimal Penerbitan (BMP) SBSN tahun 2017 ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui surat nomor S-153/MK.08/2016 tanggal 8 Maret 2016, yaitu sebesar Rp16,77 triliun.
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama atas nama Menteri Agama melalui surat nomor B-2574/SJ/B.I.1/HM.00/04/2016 tanggal 12 April 2016 dan nomor B-4764/SJ/B.I.1/HM.00/06/2016 tanggal 30 Juni 2016, Menteri Perhubungan melalui surat nomor KU.001/2/4 PHB 2016 tanggal 31 Agustus 2016 dan Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atas nama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui surat nomor KU.01.01-Mn/634 tanggal 20 Juli 2016 dan nomor KU.01.01-Mn/732 tanggal 12 Agustus 2016 menyampaikan usulan proyek yang akan dibiayai melalui penerbitan SBSN TA. 2017.
4. Berdasarkan penilaian Bappenas, dapat disampaikan pertimbangan-pertimbangan dalam penyusunan Daftar Prioritas Proyek (DPP) SBSN TA. 2017 sebagai berikut:
 - a. Kementerian Agama sebesar Rp1.791,93 miliar untuk pembiayaan proyek revitalisasi dan pengembangan asrama haji, pembangunan gedung balai nikah dan manasik haji, dan peningkatan mutu sarana prasarana Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan umum dalam bidang keagamaan.
 - b. Kementerian Perhubungan sebesar Rp7.543,31 miliar untuk pembiayaan proyek dalam rangka pembangunan infrastruktur perkeretaapian dengan tujuan untuk mendukung percepatan pencapaian target pembangunan jalur KA perkotaan Jabodetabek dan akses bandara; jalur ganda dan jalur baru KA Trans Sumatera; jalur ganda lintas selatan Jawa; dan jalur baru KA trans Sulawesi.
 - c. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
 - Direktorat Jenderal Bina Marga sebesar Rp4.696,67 miliar untuk pembiayaan proyek pembangunan, pelebaran dan rekonstruksi jalan nasional, pembangunan

- jalan bebas hambatan, pembangunan jembatan dan *flyover/underpass* dengan tujuan untuk memperlancar pergerakan orang maupun barang.
- Direktorat Jenderal Sumber Daya Air sebesar Rp2.732,88 miliar untuk pembiayaan proyek pengendalian banjir, lahar, pengelolaan drainase utama perkotaan, dan pengamanan pantai; pengelolaan bendungan, embung, dan bangunan penampungan air; dan proyek penyediaan dan pengelolaan air tanah dan air baku dengan tujuan untuk menjamin ketahanan air dalam rangka mendukung ketahanan nasional. Rincian proyek sebagaimana terlampir.
5. Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, mohon kiranya usulan proyek Kementerian Agama, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui pembiayaan SBSN dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan PP No. 56 Tahun 2011.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Saudara Menteri kami ucapkan terima kasih.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL ^{IB}



Bambang P.S. Brodjonegoro

Lampiran Surat Menteri PPN/
Kepala Bappenas

Nomor : 0377 /M.PPN/11/2016
Tanggal : 4 November 2016

No	Instansi/Kegiatan/Proyek	Alokasi 2017 (Rp. miliar)
Kementerian Agama		1.791,93
1	Revitalisasi dan Pembangunan Asrama Haji	424,58
2	Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji	315,68
3	Peningkatan Mutu Sarana Prasarana PTKIN	1.051,67
Kementerian Perhubungan		7.543,31
1	Paket A (Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian Untuk Manggarai s/d Jatinegara)	654,00
2	Paket B2 (1) (Modernisasi Fasilitas Perkeretaapian untuk Jatinegara s/d Bekasi)	370,00
3	Pembangunan Jalur Ganda Martapura - Baturaja	334,50
4	Pembangunan Jalan KA Layang di Perkotaan Medan (Tahap 1 antara Medan - Bandar Khalifah Baru lintas Medan - Araskabu - Kualanamu)	1.130,00
5	Pembangunan Jalur Ganda KA antara Purwokerto - Kroya (Lintas Cirebon - Kroya Segmen III)	363,56
6	Pembangunan Jalur Ganda Lintas Solo - Surabaya antara Madiun - Jombang	1.211,57
7	Pembangunan Jalur Ganda Kroya - Kutoarjo	709,07
8	Pembangunan Jalur KA Trans Sumatera Rantauprapat - Kota Pinang - Duri- Dumai	250,00
9	Pembangunan KA Trans Sumatera Besitang - Langsa	450,00
10	Pembangunan Jalur Ganda KA Solo - Kedungbanteng	347,49
11	Pembangunan Jalur Ganda Kedungbanteng - Madiun	300,00
12	Pembangunan Jalur KA Trans Sulawesi antara Makassar - Pare-Pare	1.423,13
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		7.429,55
Direktorat Jenderal Bina Marga		4.696,67
1	Pembangunan Fly Over/Underpass/Terowongan	499,67
2	Pelebaran Jalan Nasional	516,27
3	Pembangunan Jalan	1.143,92
4	Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Solo – Kertosono Seksi 1 (MYC)	19,97
5	Pembangunan Jembatan	1.391,57
6	Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Nasional	1.125,26
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air		2.732,88
1	Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengamanan Pantai	1.000,00
2	Pengelolaan Bendungan, Embung. dan Bangunan Penampung Air Lainnya	757,17
3	Penyediaan dan Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku	975,71
Total		16.764,79